

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan inflasi di Kabupaten Bintan pada awal tahun 2026 menunjukkan kondisi yang relatif **terkendali**, bahkan cenderung mengalami **penurunan (deflasi)**. Hal ini tercermin dari Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang bernilai negatif pada periode Januari hingga Februari. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh turunnya harga komoditas utama seperti beras, cabai merah, dan bawang merah. Dari sisi harga bahan kebutuhan pokok dan penting (bapokting), secara umum berada dalam kondisi **stabil hingga menurun**, khususnya pada komoditas hortikultura seperti cabai, bawang, dan sayuran, serta telur. Namun demikian, beberapa komoditas masih mengalami tekanan harga relatif tinggi, terutama daging dan jenis cabai tertentu, yang dipengaruhi oleh tingginya harga di tingkat produsen dari daerah pemasok.

Ketersediaan bahan pokok di Kabupaten Bintan berada dalam kondisi **aman dan mencukupi**, dengan stok beras di gudang BULOG yang diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan hingga 3-4 bulan ke depan. Selain itu, produksi lokal seperti ayam dan telur turut mendukung kestabilan pasokan. Distribusi barang kebutuhan pokok juga berjalan lancar tanpa kendala signifikan, didukung oleh kesiapan infrastruktur transportasi darat dan laut.

Pada sektor jasa, khususnya layanan kesehatan dan transportasi, juga menunjukkan kesiapan yang baik. Fasilitas kesehatan tetap beroperasi optimal selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri dengan layanan 24 jam, serta cakupan jaminan kesehatan yang tinggi. Sementara itu, sektor transportasi mendukung kelancaran distribusi logistik dan mobilitas masyarakat. Meskipun kondisi saat ini relatif stabil, terdapat beberapa **risiko ke depan** yang perlu diwaspadai, antara lain potensi kenaikan harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) akibat meningkatnya permintaan, ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah, serta faktor cuaca dan gangguan distribusi yang dapat mempengaruhi ketersediaan dan harga barang. Selain itu, perubahan musim juga berpotensi meningkatkan kasus penyakit yang dapat berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat. Sebagai upaya pengendalian, Pemerintah Kabupaten Bintan terus melakukan berbagai langkah strategis, seperti pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah, pemantauan harga secara rutin, serta koordinasi intensif dengan distributor, BULOG, dan Satgas Pangan guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok.

Secara keseluruhan, kondisi inflasi, harga, dan ketersediaan barang di Kabupaten Bintan berada dalam keadaan terkendali, dengan tetap memperhatikan berbagai potensi risiko yang dapat terjadi ke depan.

Perkembangan Harga Bahan Pokok dan Penting (Bapokting)

- Harga sebagian besar komoditas stabil hingga menurun, terutama:
- Cabai, bawang, sayuran, telur
- Komoditas yang masih relatif tinggi:
- Cabai tertentu (cabai setan/nano)
- Daging (dipengaruhi harga dari daerah pemasok)
- Harga komoditas utama (kisaran):
- Ayam: ± Rp38.000-40.000/kg

- Telur: ± Rp27.000/kg
- Beras premium: ± Rp72.000–79.000
- Minyak goreng: sesuai HET ± Rp15.700/liter

Ketersediaan dan Distribusi Barang

- **Stok bahan pokok sangat mencukupi**, bahkan:
- Beras BULOG cukup untuk 3–4 bulan ke depan
- Stok tambahan beras masih dalam pengiriman
- Produksi lokal juga mendukung:
- Telur ±100.000 butir/hari
- Ayam 80.000–100.000 ekor/minggu
- Distribusi:
- **LPG, pangan, dan logistik berjalan lancar tanpa kendala signifikan**
- Didukung kesiapan transportasi laut & Pelabuhan.

Beberapa risiko yang perlu diwaspadai:

1. **Kenaikan Harga Musiman**
 - Menjelang Ramadhan & Idul Fitri:
 - Permintaan meningkat → potensi inflasi naik
 - Terutama pada daging dan cabai
1. **Ketergantungan Pasokan dari Luar Daerah**
 - Harga daging dan beberapa komoditas dipengaruhi:
 - Harga dari Batam/Jakarta (daerah pemasok)
 - Rentan jika terjadi gangguan distribusi
1. **Faktor Cuaca & Penyakit**
 - Perubahan musim memicu:
 - Penyakit(ISPA,diare,DBD)
 - (Bisa mempengaruhi produktivitas & biaya masyarakat)
1. **Distribusi dan Logistik**
 - Walau saat ini lancar, tetap ada risiko:
 - Gangguan transportasi laut/cuaca
 - (Bisa berdampak pada harga)

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Pada Triwulan I Tahun 2026, pengendalian inflasi di Kabupaten Bintan secara umum berada dalam kondisi cukup terkendali, namun masih dihadapkan pada beberapa permasalahan yang berpotensi mempengaruhi stabilitas harga ke depan.

- Permasalahan utama yang dihadapi adalah **ketergantungan pasokan dari luar**
-

daerah, terutama untuk komoditas seperti daging dan sebagian bahan pangan strategis lainnya. Hal ini menyebabkan harga di daerah sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga di wilayah pemasok seperti Batam dan Jakarta, sehingga ketika terjadi kenaikan harga di tingkat produsen, maka akan berdampak langsung pada harga di tingkat konsumen.

Selain itu, terdapat **fluktuasi harga komoditas hortikultura**, khususnya cabai dan bawang, yang pada Triwulan I menunjukkan tren penurunan harga, namun tetap berpotensi mengalami kenaikan sewaktu-waktu. Komoditas ini sangat dipengaruhi oleh faktor musim, cuaca, dan ketersediaan pasokan, sehingga menjadi penyumbang utama volatilitas inflasi daerah.

Selanjutnya, menjelang **Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)** seperti bulan Ramadhan dan Idul Fitri yang mulai terjadi pada akhir Triwulan I, terdapat **potensi peningkatan permintaan masyarakat** yang dapat mendorong kenaikan harga, terutama pada komoditas pangan utama seperti daging, ayam, telur, minyak goreng, dan gula. Dari sisi distribusi, meskipun pada Triwulan I tidak ditemukan kendala signifikan, masih terdapat **potensi risiko gangguan distribusi**, terutama yang bergantung pada transportasi laut dan kondisi cuaca. Gangguan ini dapat berdampak pada keterlambatan pasokan dan memicu kenaikan harga di pasar.

Permasalahan lainnya adalah **keterbatasan produksi lokal**, di mana beberapa komoditas belum mampu dipenuhi sepenuhnya oleh produksi daerah, sehingga masih bergantung pada pasokan dari luar. Hal ini meningkatkan kerentanan terhadap gangguan pasokan dan fluktuasi harga. Selain itu, masih terdapat tantangan dalam **pengawasan harga di tingkat pasar**, seperti potensi perbedaan harga antar wilayah dan kemungkinan kenaikan harga pada komoditas tertentu, sehingga memerlukan pemantauan yang lebih intensif. Faktor eksternal seperti **perubahan cuaca (pancaroba)** dan potensi peningkatan penyakit musiman juga menjadi risiko tambahan yang dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi, distribusi barang, serta daya beli masyarakat. **Secara keseluruhan, pada Triwulan I Tahun 2026, permasalahan pengendalian inflasi di Kabupaten Bintan dipengaruhi oleh faktor ketergantungan pasokan luar daerah, fluktuasi harga komoditas pangan, potensi lonjakan permintaan menjelang HBKN, serta risiko distribusi dan cuaca, yang memerlukan langkah antisipatif dan koordinasi lintas sektor.**

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Bintan dilakukan secara terpadu melalui berbagai langkah strategis yang melibatkan perangkat daerah dan instansi terkait. Upaya ini difokuskan pada pengendalian harga, menjaga ketersediaan pasokan, serta menjamin kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok.

Pertama, pemerintah daerah melaksanakan **operasi pasar dan pasar murah**, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Ramadan dan Idul Fitri. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dengan menyediakan bahan pokok penting seperti beras, minyak goreng, gula, telur, daging, dan terigu dengan harga yang lebih

terjangkau bagi masyarakat.

Kedua, dilakukan **pemantauan harga secara rutin dan real-time** melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP). Pemantauan ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mendeteksi secara dini adanya kenaikan harga sehingga dapat segera dilakukan langkah intervensi yang diperlukan.

Ketiga, pemerintah daerah memastikan **ketersediaan stok bahan pokok penting (bapokting)** tetap aman dan mencukupi. Hal ini dilakukan melalui koordinasi dengan Perum Bulog, distributor, serta pemasok, dengan pemantauan stok secara berkala guna menjamin ketersediaan barang hingga beberapa bulan ke depan.

Keempat, dilakukan **koordinasi aktif dengan distributor dan pemasok** dalam rangka menjaga kelancaran pasokan. Pemerintah daerah secara rutin melakukan komunikasi dan perhitungan kebutuhan stok untuk mengantisipasi potensi kelangkaan barang di pasaran.

Kelima, pemerintah bersama instansi terkait melaksanakan **pengawasan distribusi dan penegakan hukum** melalui kerja sama dengan Satgas Pangan, Kepolisian, dan Kejaksaan. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah praktik penimbunan, distribusi yang tidak lancar, serta menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.

Keenam, dalam mendukung kelancaran distribusi, Dinas Perhubungan memastikan **kelancaran arus logistik darat dan laut**, termasuk optimalisasi operasional pelabuhan. Hal ini penting untuk menjamin distribusi bahan pokok berjalan tanpa hambatan, terutama karena sebagian pasokan berasal dari luar daerah.

Ketujuh, pemerintah daerah juga melakukan **pengendalian distribusi energi**, khususnya LPG 3 kg, dengan memastikan ketersediaan dan kelancaran penyaluran. Apabila diperlukan, dilakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk penambahan pasokan.

Kedelapan, dilakukan **analisis dan evaluasi terhadap perkembangan harga komoditas strategis**, seperti beras, cabai, bawang, dan daging. Hasil analisis ini digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan lanjutan untuk menjaga stabilitas inflasi.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah berjalan cukup efektif. Hal ini terlihat dari tren inflasi yang relatif terkendali, terutama pada awal tahun 2026, yang ditandai dengan penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada beberapa periode. Dari sisi ketersediaan, stok bahan pokok penting seperti beras, minyak goreng, gula, dan komoditas lainnya berada dalam kondisi aman dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beberapa bulan ke depan. Selain itu, produksi komoditas lokal seperti ayam dan telur juga relatif stabil sehingga turut mendukung pengendalian inflasi.

Dalam hal distribusi, tidak ditemukan kendala yang signifikan. Kelancaran transportasi darat dan laut serta koordinasi antar instansi berjalan dengan baik, sehingga distribusi bahan pokok dapat dilakukan secara merata dan tepat waktu. Namun demikian, masih terdapat

beberapa tantangan dalam pengendalian inflasi, terutama pada fluktuasi harga komoditas tertentu seperti daging dan cabai. Hal ini disebabkan oleh tingginya harga pasokan dari daerah lain, yang menunjukkan bahwa faktor eksternal masih mempengaruhi stabilitas harga di daerah.

Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya strategis, seperti pelaksanaan operasi pasar, pemantauan harga secara rutin, serta koordinasi dengan distributor, Bulog, dan Satgas Pangan. Kebijakan ini cukup efektif dalam menekan lonjakan harga dan menjaga daya beli masyarakat, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional. Secara keseluruhan, kebijakan pengendalian inflasi di daerah dapat dinilai efektif, namun masih perlu ditingkatkan melalui penguatan produksi lokal, peningkatan efisiensi distribusi, serta optimalisasi koordinasi antar instansi guna menghadapi potensi tekanan inflasi di masa mendatang.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi, diperlukan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi di daerah, yaitu:

1. **Peningkatan Produksi Pangan Lokal**

Pemerintah daerah perlu mendorong peningkatan produksi komoditas pangan strategis seperti cabai, bawang, dan daging melalui dukungan kepada petani dan peternak, guna mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.

2. **Penguatan Sistem Distribusi dan Logistik**

Optimalisasi distribusi bahan pokok melalui perbaikan infrastruktur transportasi serta penguatan koordinasi antar instansi agar pasokan tetap lancar dan merata di seluruh wilayah.

3. **Optimalisasi Operasi Pasar dan Intervensi Harga**

Pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah secara tepat waktu, khususnya saat terjadi lonjakan harga dan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

4. **Peningkatan Pemantauan Harga dan Stok Secara Real-Time**

Memaksimalkan penggunaan sistem pemantauan harga dan stok bahan pokok secara berkala dan real-time guna mendeteksi potensi kenaikan harga lebih dini.

5. **Penguatan Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)**

Meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah, Bulog, distributor, serta instansi terkait dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga.

6. **Pengendalian Distribusi dan Pengawasan Pasar**

Memperketat pengawasan terhadap distribusi bahan pokok untuk mencegah penimbunan, kelangkaan, dan praktik spekulasi harga di pasar.